

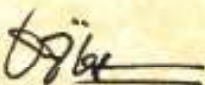
**Piagam Kesepakatan Warga Gunungkidul untuk Penanggulangan Kemiskinan
(Gunungkidul's Charter for Poverty Reduction)**

Atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Minggu tanggal 16 bulan Desember tahun 2007, kami Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat Gunungkidul selaku pemangku kepentingan di Gunungkidul dengan semangat kebersamaan, berikhtiar dalam penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul; kami bersepakat untuk:

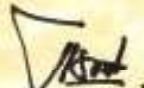
1. Bersama-sama berbagi fungsi dan peran secara proporsional, adil, transparan dan bertanggungjawab dalam upaya bersama menanggulangi kemiskinan di Gunungkidul.
2. Memprioritaskan program-program penanggulangan kemiskinan pada penyelenggaraan pelayanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan serta bidang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul dengan memperhatikan kelompok petani, kelompok perempuan, penyandang cacat (difabel) dan kelompok masyarakat rentan (korban KDRT, lansia, anak terlantar, dll).
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan agar pelaksanaannya semakin terpadu dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspirasi kelompok warga miskin dalam desain pembangunan daerah dengan dilandasi semangat kemitraan dan kesetaraan, serta berupaya menumbuhkembangkan dan melembagakan budaya pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.
4. Membuka diri dan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) untuk berpartisipasi dalam formulasi kebijakan daerah dan akan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dalam kebijakan daerah serta akan melakukan pengawasan bersama terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
5. Berpartisipasi aktif, mendukung dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.
6. Bersama-sama mengembangkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah melalui interaksi untuk menumbuhkan interdependensi (saling-ketergantungan) antar-aktor pembangunan di Gunungkidul.

Gunungkidul, 16 Desember 2007

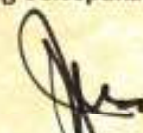
Kami yang bersepakat:



Hj. Badingah, S.Sos
Wabup Gunungkidul



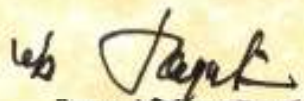
Slamet, S.Pd, MM
Ketua DPRD



Drs. Ari Gunadi, M.Pd.I
NU Gunungkidul



H.Jumidi, MA
Muhammadiyah



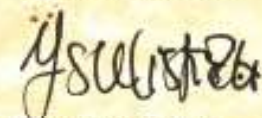
Romo V. Suryatna S., SJ
Paroki Wonosari



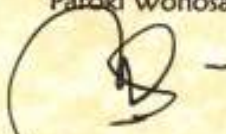
Mukarto
PGI Gunungkidul



M. Zainuri Khasan
Lakpesdam NU



Usman Musyanto
Pemuda Muh



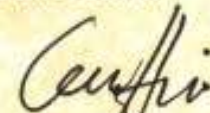
M. Taufiq AR
LSM MI-GK



S. Wardiyo
KTNA GK



Sri Suharminanik
PKK Kec. Rongkop



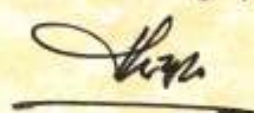
Winarti
LSM An-nisa



Nurwastuti Setyowati
Fatayat Gunungkidul



Drs. Sumedi
PMI Gunungkidul



Bakti Wibowo S.
LSM LKDS



Untung S.
LSM KAPCI

PROGRAM-PROGRAM DALAM GUNUNGKIDUL'S CHARTER FOR POVERTY REDUCTION:

Di bawah ini bisa dilihat perbandingan anggaran penanggulangan kemiskinan rentang tahun 2006 hingga 2008

Perbandingan Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan (PK) tahun 2006-2008

APBD 2006	Belanja Pelayanan Publik	Belanja Aparatur
518,924,017,026.80	202,330,208,464.00	316,593,808,562.80
100 %	38.9903342 %	61.0096658 %

Belanja Program PK dalam belanja pelayanan publik

2,227,542,500.00 1.10 %

APBD 2007	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
580,853,590,753.00	231,351,639,429.86	349,501,951,323.14
100%	39.82959615 %	60.17040385 %

Belanja Program PK dalam belanja langsung

5,316,863,750 2.30 %

APBD 2008	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
659,406,039,356.08	241,813,703,338.00	417,592,336,018.08
100%	36.67144201 %	63.32855799 %

Belanja Program PK dalam belanja langsung

1,879,359,000.00 0.777 %

Jika dilihat dari perbandingan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan rentang tahun 2006-2008 maka terdapat peningkatan alokasi untuk program PK/ Penanggulangan Kemiskinan dari tahun 2006 ke 2007 yakni sebesar 1,2 %.

a. Prioritas Program dan Anggaran dalam Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan

1. Bidang Kesehatan

a. Penambahan jumlah unit layanan kesehatan (kurun waktu 5 th kedepan) terutama wilayah pelosok dan pinggiran

2007	2008	2009
Ada 13 puskesmas perawatan, 16 non perawatan, 111 pembantu, 32 keliling (sudah ada, berdasar data BPS)	14 Puskesmas, penambahan 2 puskesmas rawat inap, 114 pustu (perkiraan di tahun 2008)	14 puskesmas, penambahan 2 puskesmas rawat inap, 116 pustu, 35 keliling
	Diupayakan masuk dalam skema RAPBD 2008 sejumlah Rp 550.000.000,-	Perkiraan anggaran dalam tahun anggaran 2009 Rp 600.000.000,-

b. Optimalisasi mutu pelayanan kesehatan dengan adanya ketercukupan tenaga medis

2006	2007	2008	2009
54 dokter umum, 29 dokter gigi, spesialis 12, bidan 156, perawat 282 (total 533 tenaga medis, berdasar data BPS).	59 dokter umum 31 dokter gigi, 13 spesialis, 166 bidan, perawat 302 (Perkiraan tahun 2007)	64 dokter umum, 34 dokter gigi, 14 spesialis, 183 bidan, 332 perawat (perkiraan tahun 2008)	69 dokter umum, 37 dokter gigi, 15 spesialis, 202 bidan, 365 perawat (perkiraan tahun 2009)
Sharing APBN dan APBD	Sharing APBN dan APBD	Sharing APBN dan APBD	Sharing APBN dan APBD

c. Sosialisasi layanan konsultasi klinik sehat di puskesmas

	2007	2008	2009
	Sosialisasi klinik sehat Rp 29.000.000,-	Program Pengembangan media dan informasi sadar hidup sehat	Program Pengembangan media dan informasi sadar hidup sehat Program
Perkiraan Anggaran	Sudah masuk dalam anggaran	Realisasi masuk dalam RAPBD 08 sebesar Rp 75.000.000 ,- (masukan dari MI-GK)	Rp 30.000.000,-

d. Memperbaiki prosedur layanan kesehatan bagi pasien dari keluarga miskin pemegang kartu JAMKESOS, ASKESKIN, dan SKTM melalui sosialisasi SPM (Standar Pelayanan Minimum) dan Citizen'Charter

e. Penambahan jumlah alokasi dana anggaran untuk pemberdayaan dan pengembangan aktivitas POSYANDU.

Tahun	Keterangan	Lokasi	Jumlah (Rp)
06	Pelatihan kader posyandu untuk 544 posyandu Pengembangan posyandu Pembinaan posyandu lansia TOTAL		177,130,000 23,500,000 20,220,000 220,850,000
07	1. belanja cetak peta kadarsi 2. bbm tilik posyandu 3. hr tim tilik 4. konsumsi tilik posyandu 5. sewa kursi 6. sewa tenda 7. Hr tim jambore posyandu	Tidak jelas	14,570,000.00 2,880,000.00 1,440,000.00 5,200,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 1,275,000.00

	8. belanja modal, dan barang jasa jambore 9. Hr pelaksana posyandu di desa TOTAL		26,457,000.00 1,000,000.00 55,622,000.00
08	1. Persentase posyandu purnama 50 % 2. Tilik posyandu sebanyak 12 3. Adanya insentif bagi kader masing-masing posyandu 2 orang kader 4. Persentase balita ikut posyandu TOTAL	1457 posyandu 12 posyandu 1457 posyandu 1457 posyandu	Rp 600,000,000
09	Pengembangan Desa Siaga Pengembangang posyandu TOTAL		120,000,000 600,000,000 720,000,000

2. Bidang Pendidikan

a. Merealisasikan pelaksanaan pendidikan murah untuk jenjang pendidikan wajar (wajib belajar) 9 tahun (SD-SMP)

Tahun	Keterangan	Lokasi	Jumlah (Rp)
06	beasiswa SMA/SMK/MA	Kab GK	117,000,000.00
	retrivel SMA/SMK/MA		175,000,000.00
	beasiswa transisi SMP/MTS		-
	beasiswa prestasi SMP/MTs		315,000,000.00
	beasiswa bakat prestasi SD/MI		450,000,000.00
	TOTAL		1,057,000,000.00
07	beasiswa SMA/SMK/MA	Kab GK	312,000,000.00
	retrivel SMA/SMK/MA		200,000,000.00
	beasiswa transisi SMP/MTS		600,000,000.00
	beasiswa prestasi SMP/MTs		315,000,000.00

	beasiswa bakat prestasi SD/MI		450,000,000.00
	TOTAL		1, 877,000,000.00
08	Penyediaan buku pelajaran bagi jenjang SD-SMP	Kab GK	2,500,000,000.00
	Pemberian beasiswa		
	TOTAL		1,250,304,000.00
			3,750,000,000.00

- b. Melanjutkan penuntasan program penanggulangan buta huruf bagi 47.000 penduduk Gunungkidul, melalui pendidikan keaksaraan dalam skema pendidikan non formal

2006	2007	2008	2009
Tidak ada	Tidak ada	Rp 2,582,125,000 (2M)	Rp 2M

- c. Mengatasi problem pengangguran melalui program pendidikan ketrampilan, kewirausahaan dan perluasan lapangan kerja

Tahun	Keterangan	Lokasi	Jumlah (Rp)
07	PROGRAM : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	18 kecamatan	889,663,000
08	PROGRAM : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga	18 kecamatan	1,579,592,500

	Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		
09	PROGRAM : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		1,5 M

3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mengalokasikan dana penopang aktivitas pertanian, pedesaan melalui program LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan),

Tahun	Keterangan	Lokasi	Jumlah (Rp)
07	Hr tim LUEP Hr peserta pelatihan LUEP belanja modal, barang dan jasa TOTAL	Tidak ada keterangan	3,915,000 750,000 1,680,000 6,345,000
08	Adanya unit pengelolaan permodalan kelompok petani (UPPKP) untuk menjawab pertanyaan petani yang tidak punya posisi tawar.	Harus diperjelas lokasi, volume, dan unit program dengan ketercapaian kinerja anggaran	2,4 M

09	Adanya unit pengelolaan permodalan kelompok petani (UPPKP) Adanya BUMP (Bank usaha Milik Petani)	Harus diperjelas lokasi, volume, sasaran dengan kinerja anggaran	2,8 M (Target)
----	---	--	----------------

b. Menambah jumlah alokasi anggaran ADD untuk pemberdayaan masyarakat desa serta penyalurannya bersifat transparan

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
06	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Dana Desa • Dana Abadi Desa • Bantuan pembinaan usaha ekonomi desa • Bantuan USEP keluarga miskin • Bantuan pendampingan pokmas IDT • Bantuan pemberdayaan dan penguatan modal orsos 	10.000.000.000 2.880.000.000 122.500.000 95.200.000 30.000.000 105.000.000
	Jumlah	13,232,700,000
07	Alokasi Dana Desa	16.000.000.000
08	Kegiatan pemberdayaan masyarakat ADD	5,031,497,000 19.000.000.000
09	ADD	20 M

c. Menambah jumlah instalasi SIPAS berbasis komunitas untuk mengurangi dampak kekeringan/kesulitan pengadaan air

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
08	Pembangunan SIPAS : Kec. Panggang Kec. Girisubo Kec. Patuk	300,000,000 300,000,000 250,000,000
09	Pembangunan SIPAS	Tambahan 10% dari

	Di 3 titik daerah sulit air (sehingga dengan skema anggaran terbatas, bisa melakukan upaya berkala pembangunan SIPAS	anggaran SIPAS APBN
--	--	---------------------

d. Mengalokasikan anggaran dana yang proporsional untuk kelompok perempuan, anak dan penyandang cacat (difabel)

Anggaran Gender (perempuan, anak, difabel)¹

2006	2007	2008	2009
Perempuan dan anak Rp.112.500.000, atau 0,02% dari total belanja APBD.	Perempuan dan anak Rp. 183.291.700,- (0,03 % dari total belanja APBD)	Urusan perempuan dan anak Rp. 621.155.000 (0,09% dari Total belanja APBD)	Penambahan anggaran sebesar 3% dari APBD 2009
Difabel (kegiatan bantuan untuk SLB Rp. 23.500.000,-)	Difabel (Rp. 72.065.000,-) 0,01% dari total APBD 1. Rp 58.015.000.untuk kegiatan pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan. 2. Rp. 14.050.000 untuk pendayagunaan	Difabel (Rp. 20.000.000,-) 0,03 % dari total belanja APBD	

¹ Dalam Negeri No 132 tahun 2003, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, BAB 111 pasal 9 ayat 1 telah menegaskan bahwa:

“Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota sekurang-kurangnya minimal sebesar 5 % (lima persen) dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota.”

	penyanggah cacat & ex trauma. Dg rincian untuk belanja barang dan jasa Rp 9.835.000,- sisanya untuk belanja aparatur (70 % belanja program, 30 % belanja aparatur)		
--	--	--	--

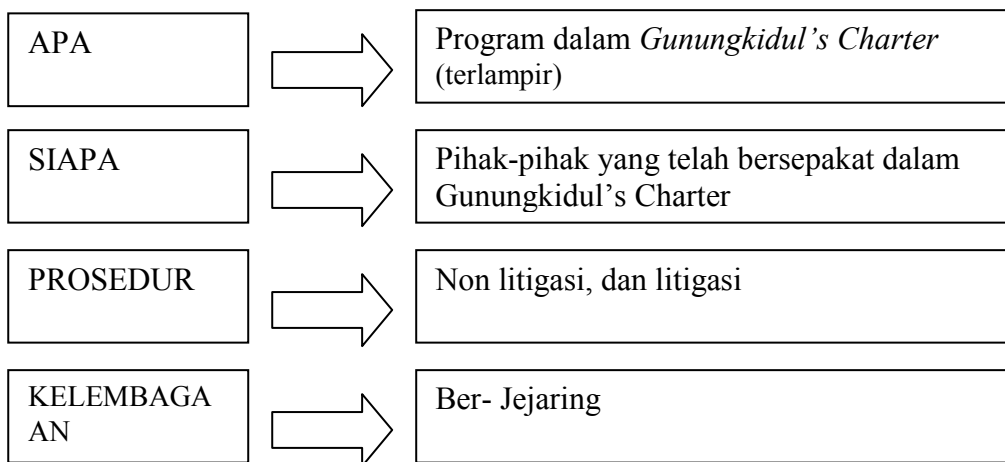
Rumusan Kerangka Monitoring Kesepakatan dalam Gunungkidul's Charter (versi warga/ Rumusan Advokasi kebijakan anggaran)

Kemiskinan yang menjadi persoalan menahun, menjadi komoditas bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari persoalan kemiskinan. Kemiskinan pada akhirnya ditanggulani dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat karitas, dengan pendekatan program jangka pendek. Pendekatan semacam ini tentunya tidak mendidik masyarakat, yang menyebabkan *mental block* yang melekat pada karakter masyarakat berupa 'tidak malu' mengaku miskin karena masyarakat merasa diuntungkan dengan stigma miskin. Sudah saatnya pendekatan penanggulangan kemiskinan ini didekati dengan pendekatan pemberdayaan, sehingga masyarakat berperan secara aktif dalam menanggulangi persoalan yang ada dalam lingkungannya, salah satunya adalah persoalan kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan ini nantinya mensyaratkan adanya kesadaran dari multi pihak terhadap peran masing-masing, baik itu pemerintah (eksekutif, legislatif), partai politik, akademisi, masyarakat yang diwakili oleh organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi yang sudah *establish* dalam masyarakat seperti PKK, karang taruna, kelompok kader Posyandu, kelompok tani, dsb.

Persoalan kemiskinan di Gunungkidul tidak jauh berbeda dengan kondisi di atas. Namun demikian, itikad baik dari para *stakeholders* untuk menanggulangi kemiskinan ini sudah terlihat dengan ditandatanganinya *Gunungkidul's Charter* yang memuat komitmen politik dari para pemangku kepentingan yang diwakili oleh berbagai unsur, baik itu pemerintah, juga masyarakat. *Gunungkidul's Charter* ini memuat beberapa program penanggulangan kemiskinan yang disepakati bersama antar pihak. Kesepakatan ini harus dikontrol, diawasi bersama oleh pihak-pihak yang telah membuat kesepakatan untuk menjamin dilaksanakannya kesepakatan yang telah dibuat.

Untuk itu diperlukan kerangka dan mekanisme monitoring Gunungkidul's Charter. Berikut bisa dilihat rumusan dari warga terkait kerangka pengawasan rumusan GC.

Perencanaan Monitoring



Perencanaan Monitoring oleh Warga

NO	AKTOR	MEKANISME	KELEMBAGAAN
1	Perangkat Desa	Melakukan upaya transparansi program-program pembangunan Sosialisasi hasil GC Menciptakan dinamisasi kelompok-kelompok masyarakat	Perangkat desa Organisasi kemasyarakatan di tingkat desa
2	PKK	Melakukan pemberdayaan kader Menginformasikan & sosialisasi GC) Mengkritisi kinerja perangkat desa	Dinas Pendidikan Kab GK Perangkat Desa
3	Kelompok tani	Pemberdayaan masyarakat tani Dengan transparansi/ adopsi teknologi, merekayasa/ merangsang potensi sumberdaya Menginformasikan & sosialisasi GC kepada masyarakat	Birokrasi Swasta LSM Teknokrat (akademisi)
4	PKBM	Mengembangkan PKBM di masing-masing level yang digarap Menginformasikan & sosialisasi GC kepada masyarakat	Dinas Pendidikan

5	ORMAS Keagamaan (NU)	Melakukan kegiatan sosial di masyarakat Sosialisasi hasil GC	ORMAS Lintas Keagamaan
6	SELURUH LEMBAGA	Membuat Posko Pengaduan Dengan 2 jalur: Jalur eksekutif (kotak saran, telepon/ SMS bebas pulsa) Jalur legislatif dengan TURBA 'turun bawah' ke konstituen serta pendidikan politik bagi warga oleh Parpol.	ORMAS Lintas Agama (kepemudaan)